Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Anton Sujarwo

 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Sakararepmu

 Alamat Kantor : Jalan Wijaya Nomor 5, Jakarta Selatan

 Nomor HP : 081359783182

 Email : jarwo\_kuat@sakarepmu.com

 NIK : 3306 1244 03910302

2. Nama : Tina Toon

 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Sakararepmu

 Alamat Kantor : Jalan Wijaya Nomor 5, Jakarta Selatan

 Nomor HP : 083878592347

 email tina\_toon@sakarepmu.com

 NIK : 3306 1354 03310607

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Sakarepmu, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/VII/2018 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) Mahendra, S.H. [NIK 1324 1354 05510607; Kartu Advokat. 20956]

2) Siti Badriah, S.H. [NIK 1312 1344 05510873; Kartu Advokat. 28793]

3) Inces*,* S.H*.* [NIK 1223 1344 04510072; Kartu Advokat. 33054]

4) Hamidun, S.H. [NIK 1325 1334 14710623; Kartu Advokat. 33054]

5) Aliando, S.H. [NIK 1423 1334 14440667; Kartu Advokat. 38952]

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Mahendra & Partners** yang beralamat di Jalan Wijaya Nomor 5, Jakarta Selatan, nomor telepon 021-535 4490 *email*: mahendra\_partners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ............................................................................ **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ....................................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB (bukti P-1), sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.
7. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
12. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.30 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut*.*

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL SULTENG**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 32.300 | 57.750 | 25.450 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 25.450 | 25.450 | 0 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 37.690 | 12.240 | -25.450 |
| Total | 95.440 | 95.440 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Poso sebanyak 12.700 suara, penambahan suara Parpol Suka-suka sebanyak 12.700 suara (bukti P-3 sampai dengan bukti P-5);
2. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Morowali sebanyak 12.750 suara, penambahan suara Parpol Suka-suka sebanyak 12.750 suara (bukti P-6 sampai dengan bukti P-8);
3. Menurut Pemohon, pengurangan tersebut terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh petugas PPK bekerjasama dengan oknum kepala daerah yang tidak netral. Hal ini dibuktikan dengan adanya form C-1 yang berbeda antara yang dimiliki saksi Pemohon dengan yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan dan Bungku Tengah. Hal ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Sulawesi Tengah, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dibuktikan dengan bukti laporan kepada Bawaslu Poso (bukti P-36).
	1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL SULTENG**

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPR** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Suwito | 10.500 | 11.750 | 1.250 |
| 2. | Dwi Santika | 11.450 | 11.450 | 0 |
| 3. | Drajat  | 11.690 | 10.440 | -1.250 |
| Total | 33.640 | 33.640 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon (Suwito) di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 500 suara, penambahan suara Calon lain (Drajat) sebanyak 500 suara (bukti P-9 sampai dengan bukti P-12);
2. Pengurangan suara Pemohon (Suwito) di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 750 suara, penambahan suara Calon lain (Drajat) sebanyak 750 suara (bukti P-13 sampai dengan bukti P-15);
3. Bahwa Pemohon menduga suara Pemohon (suwito) dipindahkan kepada calon lain atas nama Drajat oleh oknum PPK di Kecamatan Banggai Tengah, di mana C-1 yang digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan telah dimanipulasi dan diubah angkanya, yaitu pada TPS 12 dan TPS 11 Desa Paru. Di mana C-1 yang dimiliki oleh saksi Pemohon berbeda dengan C-1 yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi.
	1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL SULTENG 3**

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN TOLI-TOLI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 22.300 | 22.750 | 450 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 21.450 | 21.450 | 0 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 22.690 | 22.240 | -450 |
| Total | 66.440 | 95.440 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Toli-Toli sebanyak 450 suara dan penambahan suara Parpol Suka-suka sebanyak 450 suara (bukti P-16 sampai dengan bukti P-18);

Selisih tersebut terjadi karena adanya pemindahan angka dari angka perolehan Pemohon menjadi angka perolehan Partai Suka-Suka, dengan rincian 200 suara di TPS 2 Desa Belon dan 250 suara di TPS 3 Desa Belon. Menurut Pemohon pada saat itu, pada saat penghitungan suara di dua TPS tersebut terjadi kericuhan sehingga kotak suara dibawa ke kantor Kepala Desa. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oknum KPPS untuk mengubah perolehan suara. Hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Toli-Toli namun hingga rekapitulasi belum ada tindakan (bukti P-37.)

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KABUPATEN BUOL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 18.500 | 18.880 | 380 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 18.700 | 18.320 | -380 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 17.690 | 17.690 | 0 |
| Total | 54.890 | 54.890 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Buol sebanyak 380 suara dan penambahan suara Parpol Jadi-Jadian sebanyak 380 suara (bukti P-19 sampai dengan bukti P-21). Menurut Pemohoh, terjadi pemindahan suara dari Pemohon kepada Partai Jadi-Jadian yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS atas desakan oknum kepada Desa di TPS 1 dan TPS 4 Desa Marimari. Saksi Pemohon kemudian melaporkan kepada pengawas lapangan, namun tampaknya tidak diteruskan kepada Bawaslu. (bukti P-41);

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL SULTENG 1**

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KOTA PALU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Kahar | 8.500 | 8.750 | 250 |
| 2. | Manaf | 8.650 | 8.450 | -250 |
| 3. | Wiliyati  | 7.690 | 7.690 | 0 |
| Total | 24.890 | 24.890 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Pengurangan suara Pemohon (Kahar) di Kota Palu sebanyak 250 suara, penambahan suara Calon lain (Manaf) sebanyak 250 suara (bukti P-22 sampai dengan bukti P-25).

Menurut Pemohon, pengurangan tersebut terjadi karena pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS bekerjasama dengan oknum kepala daerah yang tidak netral. Hal ini dibuktikan dengan adanya form C-1 yang berbeda antara yang dimiliki saksi Pemohon dengan yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Palu Selatan.

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**DAPIL SIGI 2**

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 2.300 | 2.700 | 400 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 1.450 | 1.450 | 0 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 2.690 | 2.290 | -400 |
| Total | 6.440 | 6.440 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Nokilalaki sebanyak 400 suara dan penambahan suara Parpol Suka-suka sebanyak 400 suara (bukti P-26 sampai dengan bukti P-28);

Menurut Pemohon, terjadi pemindahan suara dari Pemohon kepada Partai Suka-Suka yang dilakukan oleh oknum petugas KPPS atas paksaan massa pendukung salah Partai Suka-suka di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Minyakan. Saksi Pemohon kemudian melaporkan kepada pengawas lapangan dengan disaksikan kepolisian, namun tampaknya tidak diteruskan kepada Bawaslu. (bukti P-47);

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 8.500 | 8.850 | 350 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 8.700 | 8.350 | -350 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 7.690 | 7.690 | 0 |
| Total | 24.890 | 24.890 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Palolo sebanyak 350 suara dan penambahan suara Parpol Jadi-Jadian sebanyak 350 suara (bukti P-29 sampai dengan bukti P-30);

Menurut Pemohon hal ini terjadi karena beredarnya hasil rekap tingkat TPS dalam bentuk Form C-1 palsu. Angka pada form tersebut berbeda dengan hasil penghitungan sebenarnya dan tanda tangan saksi Pemohon pada form tersebut telah dipalsukan, namun kemudian dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat Desa. Pemohon dirugikan dengan berpindahnya angka Pemohon menjadi angka Partai Jadi-Jadian. Saksi Pemohon kemudian melaporkan kepada pengawas lapangan dengan disaksikan kepolisian, namun hingga rekapitulasi selesai tidak ada tindak lanjut. (bukti P-49);

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**DAPIL SIGI 2**

**Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Mansur | 2.200 | 2.200 | 0 |
| 2. | Sapuah | 2.650 | 2.850 | 200 |
| 3. | Asraf  | 2.690 | 2.490 | -200 |
| Total | 7.540 | 7.540 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya Pengurangan suara Pemohon (Sapuah) di Kecamatan Nokilalaki sebanyak 200 suara, penambahan suara Calon lain (Asraf) sebanyak 200 suara (bukti P-31 sampai dengan bukti P-33);

Menurut Pemohon, Termohon melakukan rekapitulasi dengan menggunakan form C-1 yang telah dipalsukan dan diubah angka-angkanya pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Pakis. Sehingga Pemohon dirugikan karena tidak menggunakan perolehan suara sebenarnya.

**Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Mansur | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2. | Sapuah | 2.150 | 2.200 | 50 |
| 3. | Asraf  | 2.200 | 2.150 | -50 |
| Total | 6.350 | 6.350 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon (Sapuah) di Kecamatan Palolo sebanyak 50 suara, penambahan suara Calon lain (Asraf) sebanyak 50 suara (bukti P-34 sampai dengan bukti P-35);

Menurut Pemohon, Termohon melakukan rekapitulasi dengan menggunakan form C-1 yang telah dipalsukan dan diubah angka-angkanya pada TPS 8 dan TPS 9 Desa Dua Jambu. Sehingga Pemohon dirugikan karena rekapitulasi di tingkat Kecamatan Palolo tidak menggunakan perolehan suara sebenarnya.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB, untuk pengisian keanggotaan:
	* + - 1. DPR dan Calon Anggota DPR (Suwito) sepanjang Dapil Sulteng;
				2. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Dapil Sulteng 3 dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Kahar) sepanjang Dapil Sulteng 1;
				3. DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sepanjang Dapil Sigi 2 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sapuah) sepanjang Dapil Sigi 2;
				4. Ambang Batas untuk penentuan kursi DPR sepanjang perolehan suara di Dapil Sulteng;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
	1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SULTENG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 57.750 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 25.450 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 12.240 |
| Total | 95.440 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SULTENG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPR** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Suwito | 11.750 |
| 2. | Dwi Santika | 11.450 |
| 3. | Drajat  | 10.440 |
| Total | 33.640 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULTENG 3**

**KABUPATEN TOLI-TOLI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 22.750 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 21.450 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 22.240 |
| Total | 95.440 |

**KABUPATEN BUOL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 18.880 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 18.320 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 17.690 |
| Total | 95.440 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULTENG 1 Di KOTA PALU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Kahar | 8.750 |
| 2. | Manaf | 8.450 |
| 3. | Wiliyati  | 7.690 |
| Total | 24.890 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL SIGI 2**

**KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 2.700 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 1.450 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 2.290 |
| Total | 6.440 |

**KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Sakarepmu | 8.850 |
| 2. | Partai Jadi-Jadian | 8.350 |
| 3. | Partai Suka-Suka  | 7.690 |
| Total | 24.890 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL SIGI 2**

**KECAMATAN NOIKALALAKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA** **DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Mansur | 2.200 |
| 2. | Sapuah | 2.850 |
| 3. | Asraf  | 2.490 |
| Total | 7.540 |

**KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA CALON ANGGOTA** **DPRD PROVINSI** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Mansur | 2.000 |
| 2. | Sapuah | 2.200 |
| 3. | Asraf  | 2.150 |
| Total | 6.350 |

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pemohon**

* + - 1. Mahendra, S.H. ( ----ttd---)
			2. Siti Badriah, S.H. ( ----ttd---)
			3. Inces*,* S.H. ( ----ttd---)
			4. Hamidun, S.H. ( ----ttd---)
			5. Aliando, S.H. ( ----ttd---)